



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

URGENSI KAPAL BARU PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang hampir 2/3 lautan dan hanya 1/3 daratan, keberadaan kapal sebagai alat transportasi menjadi penting dan diutamakan. Kapal digunakan sebagai penghubung tidak hanya antarpulau, namun juga untuk melayani pulau-pulau terluar dan terpencil yang tidak mungkin dicapai dengan kendaraan lain selain kapal. Kapal menjadi sangat penting dan strategis sebagai moda transportasi yang menghubungkan antarpulau dan wilayah di Indonesia.

Namun, kondisi kapal yang menjadi tulang punggung dan vital bagi negara kepulauan belum menjadi perhatian pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi Kapal Motor (KM) Umsini dimana timbul percikan di area mesin pada tanggal 9 Juni 2024. Menurut Evan Eryanto, percikan api tersebut berasal dari motor bantu kapal. Pada saat kejadian, tidak kurang dari 1.677 penumpang di atas kapal berencana melaju ke Surabaya Jawa Timur, Daerah Khusus Jakarta, dan Kijang, Tanjung Pinang. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Namun, permasalahan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) (Persero) tidak berhenti sampai terjadinya peristiwa tersebut.

Ketiadaan satu unit kapal berpengaruh besar karena permintaan angkutan laut untuk penumpang terus mengalami peningkatan. Bahkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan jumlah angkutan laut melebihi angkutan udara. Direktur Utama PT Pelni (Persero), Tri Andayani, mengatakan bahwa rata-rata perusahaan mendapatkan izin untuk mengangkut 30 – 40 persen dari total kapasitas kapal sepanjang tahun 2023.

Jika menghitung *crossing* dan *spare part* saat *docking*, kondisi ideal bagi PT Pelni (Persero) agar operasional tidak terganggu membutuhkan kurang lebih 75 kapal. Namun, kondisi saat ini PT Pelni (Persero) hanya memiliki 26 kapal. Kondisi ini diperparah dengan mayoritas armada milik PT Pelni (Persero) sudah melewati batas umur teknis yang telah dirancang oleh pabrik asal Jerman yaitu 30 tahun.

Dari total 26 kapal yang dimiliki PT. Pelni (Persero), ada sebanyak 12 unit kapal sudah melewati batas umur teknis. KM Umsini yang mengalami tragedi kebakaran telah berusia 39 tahun. Usia kapal yang melewati umur teknis sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan penumpang dan peningkatan kinerja PT Pelni (Persero). Masalah pelik yang dihadapi oleh manajemen PT Pelni (Persero) adalah keuangan perusahaan tidak akan mencukupi untuk membeli kapal baru. Kinerja keuangan PT Pelni (Persero) mengalami tren penurunan khususnya terkait dengan pendapatan dan laba perusahaan.

Kondisi yang dihadapi perusahaan mendorong perusahaan menunggu penyertaan modal negara untuk membeli lima kapal pada tahun 2024 dan 2025. PT Pelni (Persero) mengajukan penyertaan modal negara sebesar Rp5,5 triliun untuk rencana tersebut. Pengamat transportasi

dari Institut Transportasi, Darmaningtyas, menilai bahwa PT Pelni (Persero) sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) khususnya Komisi VI DPR RI.

Atensi DPR

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan kapal menjadi moda transportasi yang sangat penting dan vital. Hal ini berdampak terhadap keberadaan kapal PT Pelni (Persero) sebagai tulang punggung moda transportasi yang menghubungkan antarpulau dan wilayah di Indonesia menjadi penting. Namun, data jumlah armada yang dimiliki oleh PT Pelni (Persero) belum mencukupi untuk menampung peningkatan jumlah penumpang hingga saat ini. PT Pelni (Persero) hanya memiliki 26 kapal dari total kebutuhan sebanyak 75 kapal. Kondisi ini diperparah dengan umur teknis kapal milik PT Pelni (Persero). Dari total 26 kapal, sekitar 12 kapal memiliki umur teknis yang melebihi aturan yang dirancang oleh pabrikan. Salah satunya adalah KM Umsini yang memiliki umur teknis 39 tahun. Kondisi ini mendorong urgensi rencana PT Pelni (Persero) untuk mendapatkan penyertaan modal negara dalam rangka membeli 5 kapal pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah dan Komisi VI DPR RI.

Sumber

Koran Tempo, 13 Juni 2024;

Kompas.id, 9 Juni 2024;

Tribun, 14 Juni 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://pusaka.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 @pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024